

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

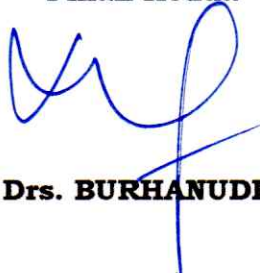
Nama : **Drs. LIATIM**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Perdagangan
Kabupaten Belitung Timur
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. BURHANUDIN**
Jabatan : Bupati Belitung Timur
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Drs. BURHANUDIN

Manggar, Januari 2022

Pihak Pertama



Drs. LIATIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641224 199203 1 007

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	1.1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang	Nilai	65-76,60 = C
		1.2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B > 60-70
		1.3	Cakupan Layanan Penunjang yang Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Persen	70
2	Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah	2.1	Rata - Rata Tingkat Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Sedang
		2.2	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	26
		2.3	Persentase Industri Kecil Menengah yang Telah Memiliki Izin Usaha	Persen	25
		2.4	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	Persen	83,50
3	Meningkatkan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	3.1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen	65,00
		3.2	Persentase Data Perizinan, Non Perizinan dan Informasi Penanaman Modal Dikelola Berdasarkan Sektor Usaha	Persen	54,55
4	Meningkatkan investor yang berinvestasi	4.1	Persentase penambahan investor yang merealisasikan investasinya (PMDN/PMA) berdasarkan LKPM	Persen	11,2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		4.2	Cakupan Kebijakan Daerah Terkait Penanaman Modal Yang Telah Ditetapkan	Persen	66,67
		4.3	Investor Baru yang Berinvestasi	investor	1
		4.4	Investor Baru Berskala Nasional yang Merealisasikan Investasinya	investor	18
5	Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah	51	Nilai produksi industri kecil dan menengah sektor pangan dan kerajinan	Rupiah	242.849.110
		5.2	Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah	persen	5,80
		5.3	Persentase Data Informasi Industri Di SIINAS	persen	58,33
6	Meningkatnya PDRB sector perdagangan	6.1	PDRB sector perdagangan (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	548,96
		6.2	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persen	100
		6.3	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	persen	3,99
		6.4	Produk Unggulan yang Memenuhi Standar Ekspor	Produk	1
		6.5	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	72
		6.6	Persentase Kesesuaian BDKT yang Diawasi Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Persen	70

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.282.350	APBD II
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.879.543.000	APBD II
		1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.119.000	APBD II
				1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.418.000	APBD II
		1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.120.000	APBD II
				1.4.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	119.679.173	APBD II
				1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.673.820	APBD II
				1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.383.000	APBD II
				1.4.5	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	72.891.570	APBD II
				1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.360.000	APBD II
				1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.228.000	APBD II
				1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.396.000	APBD II
		1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121.137.020	APBD II

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
		1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6.1	Penyediaan Jasa Surat - Menyurat	186.040.000	APBD II
				1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ari dan Listrik	182.720.000	APBD II
				1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	358.537.500	APBD II
		1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	275.388.500	APBD II
				1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.500.000	APBD II
				1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	33.100.000	APBD II
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6.799.700	APBD II
		2.2	Pembuatan Peta Potensi Invetasi Kabupaten/Kota	2.2.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	35.093.000	APBD II
3	Program Promosi Penanaman Modal	3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.1.1	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	130.187.500	APBD II
				3.1.2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	111.316.000	APBD II
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	230.179.500	APBD II

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
				1.4.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	10.247.800	APBD II
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	113.518.000	APBD II
				5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	195.323.000	APBD II
				5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	168.134.500	APBD II
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.1.1	Pengolahan, Penyajiandan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	40.140.000	APBD II
7	Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan	7.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	7.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30.000.000	APBD II
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	8.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	348.363.450	APBD II
				8.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.802.132.460	APBD II
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	9.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	9.1.1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	30.000.000	APBD II

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
		9.2	Pengendalian Harga, dan Stok BarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting diTingkat Pasar Kabupaten/Kota	9.2.1	Pemantauan Harga danStok Barang Kebutuhan Pokok dan BarangPenting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	33.000.000	APBD II
		9.3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsididi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.3.1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.000.000	APBD II
				9.3.2	Pengawasan PengadaanPupuk dan Pestisida Bersubsidi	6.000.000	APBD II
				9.3.3	Pengawasan Penyalurandan Penggunaan Pupukdan Pestisida Bersubsidi	6.000.000	APBD II
10	Program Pengembangan Ekspor	10.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.1.1	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	20.000.000	APBD II
11	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	11.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan	11.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeraUlang	168.499.730	APBD II
				11.1.2	Pengawasan/ PenyuluhanMetrologi Legal	24.999.950	APBD II
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	12.1	Penyusunan dan Evaluasi RencanaPembanguna n Industri Kabupaten/Kota	12.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	38.100.200	APBD II
				12.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	137.437.150	APBD II

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
				12.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20.062.750	APBD II
				12.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.124.583.370	APBD II
				12.1.5	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	42.899.800	APBD II
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	13.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	13.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10.349.800	APBD II
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	14.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	14.1.1	Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	73.646.000	APBD II
	14 Program	23 Kegiatan		47 Sub Kegiatan		16.691.530.593	

Pihak Kedua



Drs. BURHANUDIN

Manggar,

Januari 2022

Pihak Pertama



Drs. LIATIM

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19641224 199203 1 007